

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam pendidikan terjadi proses perubahan sikap dan tata laku seseorang, dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya bimbingan, pengajaran, penanaman nilai-nilai serta dasar-dasar pandangan hidup kepada generasi muda, agar nantinya menjadi manusia yang sadar dan bertanggung jawab akan tugas-tugas hidupnya sebagai manusia, sesuai dengan sifat, hakekat, dan ciri-ciri kemanusiaannya.

Kemajuan suatu bangsa ditopang oleh kualitas pendidikannya. Kualitas pendidikan merupakan tolak ukur dari kemajuan suatu bangsa. Tanpa pendidikan, suatu negara akan jauh tertinggal dari negara lain. Diantara indikasi kemajuan pendidikan pada suatu negara dapat dilihat dari hasil-hasil penelitian yang dihasilkannya, produk lulusannya, model-model pembelajarannya, dan sebagainya.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia masih rendah. Berdasarkan *World Economic Forum* dalam *Global Competitiveness Report* "Peringkat Daya saing Indonesia pada tahun 2016-2017 mengalami mengalami penurunan dari posisi 37 ke 41".¹ Selanjutnya berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merujuk pada UNDP tahun 2015, "peringkat Indonesia berada di peringkat ke-5 di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand".² Kualitas SDM ini tentunya bergantung pada kualitas pendidikan Indonesia.

Masalah serius yang dihadapi dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Inilah yang menjadi penyebab rendahnya mutu pendidikan sebagai penghambat tersedianya sumber daya manusia yang ahli dan terampil dalam pembangunan di Indonesia.

¹ Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, *Rekomendasi Panitia Kerja Masyarakat Ekonomi Asean*, (Jakarta, 2016), 9

² Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, *Rekomendasi Panitia Kerja Masyarakat Ekonomi Asean*, 13.

Dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa “Pendidikan merupakan kunci kemajuan, semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu masyarakat/bangsa, maka akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas masyarakat/bangsa tersebut”.³

Sejak tahun 2010 pemerintah telah menggembor-gemborkan solusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan pendidikan karakter. Bahkan dalam Visi Misi Kementerian Pendidikan tahun 2015-2019 tercantum dengan jelas pendidikan karakter, yaitu “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”.⁴ Bukti keseriusan pemerintah dalam peningkatan kualitas pendidikan melalui penanaman karakter dalam pendidikan, dengan mendahulukan KI 1 sikap spiritual dan KI 2 sikap sosial, sementara pengetahuan dan keterampilan pada KI 3 dan KI 4.

Dalam menciptakan ekosistem pendidikan karakter ini tentunya bukanlah tanggung jawab sepihak, melainkan tanggung jawab bersama yang harus dipikul berlandaskan gotong royong. Keluarga, masyarakat dan lembaga-lembaga sosial dituntut untuk ikut berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan karakter. Sehingga lingkungan tempat tumbuhnya peserta didik ikut menunjang dalam pembentukan karakter peserta didik.

Salah satu bentuk manajemen pendidikan yang menyatupadukan atau menyelaraskan pelaksanaan pengaturan berbagai komponen pendidikan supaya tidak tumpang tindih, tidak berbenturan serta tidak saling lempar tugas dan tanggung jawab adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). “Prinsip-prinsip yang menjadi landasan MBS adalah otonomi, fleksibilitas, partisipasi, dan inisiatif.”⁵ Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu wujud dan reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik dengan memberdayakan

³ Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003:2

⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019* (Jakarta, Kemendikbud, 2015), 33.

⁵ Imam Machali dan Ara Hidayat, *The Handbook of Education Management – Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia*, (Yogyakarta, Prenadamedia Group, 2016), 83-85.

semua komponen sekolah mulai dan pengelolaan kurikulum, tenaga kependidikan, kesiswaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat.

Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang berperan dalam dunia pendidikan, ikut berperan dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Sebagai lembaga pendidikan Islam, madrasah menjadi bagian strategis dalam konteks menyiapkan generasi yang beriman, berakhlak mulia, serta mampu berdaya saing secara positif.

Madrasah sekarang sudah banyak mengalami kemajuan. Anggapan terhadap madrasah sebagai lembaga yang kumuh, monoton, tidak berkembang, dan mutunya rendah, sekarang mulai berkurang. Banyak madrasah yang mampu bersaing dengan lembaga pendidikan umum. Dalam menghadapi probem-problem yang dihadapi madrasah tidak terlepas dari dukungan masyarakat, dengan menjalin kerjasama atau kemitraan dengan pihak eksternal.

Dalam pelaksanaan pengelolaan pendidikan, madrasah dan masyarakat dapat melakukan kerjasama agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Kebutuhan dan keuntungan tersebut tidak lain adalah tujuan dari diadakannya kerjasama, sebagaimana pengertian kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu.⁶

Menurut Charles Horton Cooley,

kerja sama akan timbul apabila orang sadar bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang sama mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian diri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut melalui kerja sama; kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta penting dalam kerjasama.⁷

Ketika ada beberapa lembaga yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, kerja sama dapat membantu dalam meraih tujuan tersebut. Sehingga beban tugas yang dipikul oleh masing-masing lembaga menjadi ringan. Sebagaimana Al-Quran menganjurkan untuk bekerja sama dalam surat Al-Maidah, 5:2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

⁶ Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2013), 66.

⁷ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2018), 156.

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."⁸

Potongan ayat di atas menegaskan pentingnya kerja sama dalam kebaikan dan taqwa. Secara rekasional, Allah Swt. memadukan dalam ayat ini antara perintah dan larangan-Nya dengan mendahulukan konsep positif (tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa) atas konsep negatif (tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan) untuk memperkuat sisi *ta'awun* dalam kebaikan, sehingga senantiasa mewarnai dan dominan di tengah masyarakat, serta perilaku sebaliknya tidak akan muncul di tengah-tengah masyarakat.

Dalam pandangan Al-Mawardi sebagaimana yang dikutip oleh Al-Qurtubi bahwa:

perintah *ta'awun* untuk menghadirkan kebaikan dan ketakwaan di tengah-tengah manusia merupakan sebuah perintah yang memiliki korelasi dengan prinsip *hablum minallah* (hubungan dengan Allah) dan *hablum minannas* (hubungan dengan manusia); *ta'awun* dalam kebaikan yang bersifat umum merupakan sarana untuk menjaga hubungan baik dengan manusia, sedangkan *ta'awun* dalam takwa merupakan sarana untuk meraih ridha Allah swt. Sehingga tidak sempurna jika *ta'awun* itu hanya dalam *Al-Birr*, tetapi harus diteruskan dalam konteks takwa juga.⁹

Dalam pandangan Muhammad Abduh, "dibutuhkan membentuk asosiasi tertentu dengan aturan husus untuk menyatukan kelompok-kelompok muslim dan membawa mereka untuk tugas ini (kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan) dalam berbagai sudut dan pekerjaan."¹⁰

"Pelaksanaan kerjasama melibatkan pembagian tugas, di mana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama."¹¹ Sehingga dalam mencapai suatu tujuan ada saling membutuhkan dengan pihak yang lain dan mengerjakan tugas sesuai dengan fungsinya yang akan mengerucut pada satu tujuan yang disepakati.

⁸ Depag RI, *Al-Quran dan terjemahannya*. (Jakarta: Alfatih, 2013), 451.

⁹ Muhammad Sayyid Thanthawi. *al-Tafsir al-Wasith*, (Kairo: Dar Ihya' al-Turats, 1994), 4;32.

¹⁰ Abduh Muhammad dan Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar alMakrifah, 1975 M./1393 H.),

¹¹ Abdulsyani. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. 156.

“Teknik kerjasama sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan melalui: a) Badan Komite Sekolah, b) konsultasi, c) rapat bersama, d) penyusunan program bersama, dan e) ceramah”.¹² Dalam pelaksanaannya akan menjadi lebih fleksibel disesuaikan dengan kegiatan yang dibutuhkan dan perlu adanya keterlibatan dari masyarakat.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan menyatakan bahwa

Setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan. Kemitraan sekolah dapat dilakukan dengan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah seperti perguruan tinggi, sekolah pada jenjang setara, dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), serta masyarakat di lingkungannya, termasuk pesantren.¹³

Sejalan dengan upaya reformasi pendidikan nasional melalui otonomi daerah, hubungan sekolah/madrasah dengan masyarakat secara *education* dan *cultural* khususnya orang tua murid dan masyarakat sekitar sekolah/madrasah juga perlu direformasi sehingga tanggung jawab pendidikan bukan hanya pada sekolah/madrasah. Salah satunya adalah dengan membentuk Komite Sekolah/madrasah atau Majelis Madrasah untuk memberdayakan orang tua murid dalam pendidikan.

Tantangan dalam efektifitas dan keberlanjutan kerja sama sekolah tentunya ada, dinatara tantangan yang paling sering terjadi adalah “ancaman terhadap otonomi sekolah itu sendiri, ketidakseimbangan kekuatan yang dirasakan sekolah, bertambahnya beban kerja sekolah yang terkait dengan kerja sama, kesulitan dalam menetapkan tujuan Bersama, menambah biaya untuk kegiatan kerja sama.”¹⁴

Berdasarkan potret studi awal peneliti di Pondok Pesantren Sukahideng, peneliti melihat bahwa sebagian besar santri yang tinggal di Pondok Pesantren Sukahideng disamping mempelajari pendidikan agama di pesantren juga mengenyam pendidikan formal yang berada di sekitar pesantren, yaitu MTsN 1

¹² Suryosubroto, *Dimensi-dimensi Administrasi Pendidikan di Sekolah*, (Jakarta, Bina Aksara, 2004), 65.

¹³ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007

¹⁴ Paul Armstrong, *Effective school partnerships and collaboration for school improvement: a review of the evidence*, (Department for Education, 2015), 5.

Tasikmalaya, MTs KH. Wahab Muhsin, MAN 1 Tasikmalaya, SMK KH. Wahab Muhsin, dan SMA KH. Zainal Musthafa.

Berikut ini rekap santri yang tinggal di Pondok Pesantren Sukahideng berdasarkan jenjang tingkat satuan pendidikannya.

Tabel 1.1

Data Santri Pondok Pesantren Sukahideng Berdasarkan Tingkat Satuan Pendidikan

No	Sekolah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	MTsN 1 Tasikmalaya	314	418	732
2	MTs KH. Wahab Muhsin	208	142	350
3	SMP KH. Zainal Musthafa	5	4	9
4	MAN 1 Tasikmalaya	312	408	720
5	SMK KH. Wahab Muhsin	97	101	198
6	SMA KH. Zainal Musthafa	23	18	41
7	Takhossus	90	43	133
Jumlah		1049	1134	2183

Sumber: data santri Pondok Pesantren Sukahideng yang diperoleh oleh peneliti

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar santri Pondok Pesantren Sukahideng mengenyam pendidikan formal di madrasah, yaitu MTsN 1 Tasikmalaya, MTs KH. Wahab Muhsin, dan MAN 1 Tasikmalaya. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara pihak pesantren dan madrasah.

Selanjutnya, santri yang berada di Pondok Pesantren Sukahideng sebagian besar mengenyam pendidikan formalnya di ketiga madrasah ini. Sekolah/Madrasah yang paling banyak diminati oleh santri Pondok Pesantren Sukahideng adalah MAN 1 Tasikmalaya, selanjutnya MTsN 1 Tasikmalaya dan MTs KH. A. Wahab Muhsin.

Dengan adanya kerjasama yang harmonis antara sekolah dan masyarakat dalam hal ini pesantren, maka tujuan pendidikan akan dapat tercapai sesuai dengan harapan orang tua, masyarakat, pesantren, dan sekolah. Model kerjasama pengelolaan pendidikan yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Sukahideng

nampak sudah diterapkan dengan Madrasah yang ada di sekitarnya, yaitu MAN 1 Tasikmalaya, MTsN 1 Tasikmalaya, dan MTs KH. Wahab Muhsin. Madrasah sudah mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi madrasah, program madrasah disusun dan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan proses belajar mengajar, dan adanya keterbukaan dalam pengelolaan pendidikan madrasah, baik menyangkut program, anggaran, ketenagaan dan prestasi. Namun belum adanya keterlibatan semua unsur terkait dalam perencanaan program madrasah, pelaksanaan sampai dengan evaluasi (kepala sekolah/madrasah, guru, komite madrasah, tokoh masyarakat dan pesantren).

Selanjutnya, madrasah-madrasah yang berada di lingkungan Pondok Pesantren sukahideng ini melakukan kerjasama dengan pihak lainya, untuk menunjang program-program madrasah demi terwujudnya mutu pendidikan dan layanan pendidikan yang prima.

MAN 1 Tasikmalaya merupakan salah satu madrasah Aliyah yang berada di Tasikmalaya yang banyak diminati oleh masyarakat sekitar, bahkan diminati juga oleh lulusan SMP/MTs dari wilayah Tasikmalaya dan dari luar Tasikmalaya. Karena selalu menghasilkan peserta didik yang berprestasi dalam lomba/even tingkat kabupaten, wilayah priangan, provinsi bahkan tingkat nasional. Lulusan MAN 1 Tasikmalaya ini juga juga banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jakarta.

MTsN 1 Tasikmalaya juga memiliki prestasi yang cukup membanggakan. Peminat masyarakat ke MTsN 1 Tasikmalaya ini pun sama-sama cukup banyak. Banyak lulusan dari MTsN 1 Tasikmalaya yang melanjutkan ke sekolah-sekolah yang pavorit. Ini menunjukkan keberhasilan madrasah dalam mendidik peserta didiknya.

Adapun MTs KH. A. Wahab Muhsin merupakan madrasah yang baru berdiri tahun 2013. Walaupun demikian madrasah yang berstatus swasta ini mampu bersaing dalam prestasinya dengan sekolah-sekolah yang sudah lama. Minat ke madrasah ini pun tiap tahunnya semakin meningkat, berkat kepercayaan para orang tua kepada madrasah ini semakin banyak.

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan diatas, peneliti menganggap penting untuk melakukan kajian dan mengetahui lebih jauh hal tersebut melalui penelitian yang berjudul “**Model Kerjasama Pengelolaan Pendidikan Pesantren dan Madrasah (Studi Tata Kelola di MAN 1 Tasikmalaya, MTsN 1 Tasikmalaya, MTs KH. A. Wahab Muhsin dan Pondok Pesantren Sukahideng)**”

B. Perumusan Masalah

Untuk memberikan arahan yang jelas terhadap masalah yang diteliti berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membuat perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kerjasama formal di MAN 1 Tasikmalaya, MTsN 1 Tasikmalaya, MTs KH. A. Wahab Muhsin dan Pondok Pesantren Sukahideng?
2. Bagaimana kerjasama informal di MAN 1 Tasikmalaya, MTsN 1 Tasikmalaya, MTs KH. A. Wahab Muhsin, dan Pondok Pesantren Sukahideng?
3. Bagaimana kerjasama formal dan informal di MAN 1 Tasikmalaya, MTsN 1 Tasikmalaya, MTs KH. A. Wahab Muhsin, dan Pondok Pesantren Sukahideng?
4. Bagaimana kerjasama bilateral di MAN 1 Tasikmalaya, MTsN 1 Tasikmalaya, MTs KH. A. Wahab Muhsin dan Pondok Pesantren Sukahideng?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pedoman peneliti dalam melaksanakan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk:

1. Mendalami dan menganalisis konsep kerjasama formal di MAN 1 Tasikmalaya, MTsN 1 Tasikmalaya, MTs KH. A. Wahab Muhsin dan Pondok Pesantren Sukahideng.
2. Mendalami dan menganalisis konsep kerjasama informal di MAN 1 Tasikmalaya, MTsN 1 Tasikmalaya, MTs KH. A. Wahab Muhsin, dan Pondok Pesantren Sukahideng.

3. Mendalami dan menganalisis konsep kerjasama formal dan informal di MAN 1 Tasikmalaya, MTsN 1 Tasikmalaya, MTs KH. A. Wahab Muhsin, dan Pondok Pesantren Sukahideng.
4. Mendalami dan menganalisis konsep kerjasama bilateral di MAN 1 Tasikmalaya, MTsN 1 Tasikmalaya, MTs KH. A. Wahab Muhsin dan Pondok Pesantren Sukahideng.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian:

1. Bagi Penulis

Dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan penulis tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penerapan model kerjasama pengelolaan pendidikan Pesantren dan Madrasah untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

2. Bagi Instansi Madrasah dan Pesantren

Kegunaan penelitian bagi lembaga ini antara lain:

- a. Sebagai bahan masukan untuk terus mengembangkan pengelolaan pesantren dan madrasah.
- b. Sebagai upaya perbaikan serta peningkatan strategi mutu pengelolaan pendidikan sehingga menghasilkan output atau lulusan yang bermutu.
- c. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk mendayagunakan pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan yang maksimal demi kemajuan lembaga.

3. Pihak Lain.

Kegunaan penelitian bagi pihak lain yang membacanya antara lain:

- a. Memperkaya dan menambah teori-teori dalam dunia pendidikan.
- b. Dapat menjadi acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Dapat bermanfaat dalam memberikan informasi dan pengetahuan mengenai model kerjasama pengelolaan pendidikan pesantren dan madrasah, ataupun sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi peneliti berikutnya.

Kegunaan Penelitian ini juga untuk mensosialisasikan lembaga sebagai informasi dan pengetahuan mengenai model kerjasama pengelolaan pendidikan Pesantren dan Madrasah.

Gambar 1.1

